

## Analisis Peran Akuntansi Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Gumpang

Rukmini<sup>1)</sup>, Suhesti Ningsih<sup>2)</sup>, Retno Alisha Fatkhiyah<sup>3)</sup>

Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

[rukmini.stie.aas@gmail.com](mailto:rukmini.stie.aas@gmail.com), [hesti.hegi@gmail.com](mailto:hesti.hegi@gmail.com), [alisharetno@gmail.com](mailto:alisharetno@gmail.com),

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi sektor publik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di desa Gumpang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer menggunakan sumber kuesioner. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa dan kepala lingkungan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 63 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, serta uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip efisiensi dan partisipasi masyarakat pada akuntansi sektor publik mempunyai pengaruh positif yang signifikan dalam mewujudkan good governance di Desa Gumpang, hal ini dibuktikan dengan signifikansi kedua variabel yaitu sebesar 0,000. Sedangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas akuntansi sektor publik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terwujudnya good governance di Desa Gumpang, hal ini dibuktikan dengan signifikansi ketiga variabel lebih besar dari 0,050.

Kata Kunci: Efisiensi, Good Governance, Partisipasi Publik, Akuntansi Sektor Publik.

### Abstract

*This study aims to analyze the role of public sector accounting in creating good governance in Gumpang village. This research uses quantitative methods with primary data source uses questionnaire. The population and samples in this research are the entire village equipment and the head of neighborhood. Sampling techniques used purposive sampling to obtain 63 samples. The data analysis techniques used are classical assumption tests, as well as hypothesis tests using double linear regression analysis, t tests, and determination coefficients. The results of the research showed that the principle of efficiency and public participation in the public sector accounting had a significant positive impact in realizing good governance in the village of Gumpang, this is proved by the significance of the two variables, which is 0,000. While the principles of transparency, accountability, and effectiveness in the public sector accounting have no significant impact in the realization of good governance in the Gumpang Village, it is proved with the significance of the third variable that is greater than 0,050.*

**Keywords :** Efficiency, Good Governance, Public Participation, Public Sector Accounting.

## 1. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian dari suatu paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mampu untuk

---

mewarnai krisis multidimensional yang pernah terjadi pada tahun 1997-1998 seiring dengan adanya tuntutan reformasi (Rotberg, 2014). Tuntutan era reformasi yang tinggi menyebabkan munculnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Kemunculan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat mengobati birokrasi politik Indonesia yang penuh dengan kasus korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tata kelola pemerintahan di Indonesia sejak lima tahun dimulainya era reformasi hingga saat ini masih sangat jauh dari harapan atau dapat dikatakan masih belum berjalan dengan baik (Kristiyanti, 2021). Berbagai kendala dalam bentuk politik, ekonomi, hukum, serta sosial dan budaya membingungkan pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia berasumsi bahwa hanya rakyat yang memerlukan adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Asumsi tersebut membuat rakyat merasa kurang percaya dengan kinerja organisasi sektor publik sehingga menyebabkan kinerja organisasi sektor publik yang belum memenuhi ketentuan atau peraturan yang berlaku tersebut menghasilkan dampak negatif bagi rakyat dan pemerintah. Hal ini menyebabkan pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang hilang dan melayani rakyat dengan mendorong organisasi sektor publik untuk menerapkan konsep pemerintahan yang baik (Pratiwi, 2020).

Konsep pemerintahan yang baik atau dikenal pula dengan sebutan *good governance* merupakan suatu konsep pemerintahan dengan otoritas negara yang memiliki prinsip mendukung implementasi organisasi yang tepat. *Good governance* didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang hilang terhadap organisasi sektor publik sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi sektor publik dalam melayani masyarakat (Ashari, 2019). *Good governance* diartikan sebagai suatu konsep yang dapat terwujud apabila memiliki tiga pilar pendukung yang difungsikan dengan baik. Ketiga pilar dalam mewujudkan *good governance* yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat madani di suatu negara. Berdasarkan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, *good governance* mencakup berbagai macam pedoman yang terdiri dari tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, kepastian hukum, proporsionalitas, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa prinsip yang dapat diimplementasikan dengan baik melalui peran akuntansi.

Akuntansi berperan penting dalam *good governance* yaitu untuk mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, efektivitas, efisiensi, dan visi strategis. Akuntansi berperan pula di lembaga publik yaitu untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Oleh sebab itu, laporan keuangan pemerintah daerah dapat diandalkan demi terciptanya *good governance* di suatu daerah. Selain laporan keuangan, pemerintah daerah juga memainkan peranan yang cukup penting dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah di Indonesia menandakan bahwa tujuan pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemakmuran masyarakat juga akan tercapai. Kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah dikenal dengan sebutan otonomi daerah.

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban setiap daerah untuk

mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah khususnya desa berkewajiban untuk mengelola dana desa dengan nominal yang cukup besar secara mandiri. Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengelola dan mengawasi dana desa merupakan salah satu penyebab terjadi penyimpangan atau penyelewengan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan adanya kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi pada sektor anggaran dana desa, yaitu sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian yang dialami negara yaitu sebesar Rp233 miliar (Mutia, 2021). Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan dana desa tersebut membuktikan bahwa prinsip *good governance* dan akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa.

Desa merupakan salah satu organisasi sektor publik dari lembaga pemerintahan negara. Desa Gumpang sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang ada. Desa Gumpang berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku, serta laporan keuangan yang disampaikan tersebut harus bersifat akuntabel dan transparan. Keuangan desa yang dikelola dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, efektif, efisien, serta pemerintah desa yang bersikap adil dengan visi strategis dan bertanggung jawab akan menghasilkan dampak positif dalam mewujudkan *good governance* di Desa Gumpang.

Keberhasilan *good governance* di Desa Gumpang dapat terwujud pula dengan adanya keterlibatan masyarakat didalamnya. Partisipasi masyarakat bukan lagi menjadi suatu kewajiban, melainkan sudah menjadi hak bagi masyarakat di desa untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*. Perwujudan *good governance* mengisyaratkan bahwa transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan peran partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk selalu dilaksanakan oleh pemerintah serta masyarakat di Desa Gumpang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akuntansi sektor publik terutama prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan *good governance* di Desa Gumpang. Selain itu dapat pula memberikan suatu hasil penelitian yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan oleh para aparat pengambil kebijakan serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas akuntansi di Desa Gumpang.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2019). Populasi yang digunakan pada penelitian yaitu seluruh perangkat desa dan ketua RT di Desa Gumpang dan sampel yang diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu berjumlah 63 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dengan

menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis menggunakan uji analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi *adjusted r square*.

Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu prinsip-prinsip akuntansi sektor publik dalam mewujudkan *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *good governance*.

### **Transparansi**

Transparansi didefinisikan sebagai pemberian informasi secara terbuka, baik mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, serta menjamin akses bagi setiap masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut (Risya, 2017). Indikator pengukuran transparansi menurut Simanjuntak (2020) yaitu : (1) Penyediaan akses informasi yang jelas mengenai perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban; (2) Musyawarah yang melibatkan masyarakat; dan (3) Keterbukaan informasi mengenai dokumen pengelolaan keuangan desa.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat disetujui oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2021). Indikator pengukuran akuntabilitas menurut Simanjuntak (2020) yaitu : (1) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan desa; (2) Pengawasan oleh tim pelaksana; (3) Ketersediaan laporan pertanggungjawaban; dan (4) Keterlibatan aktor publik.

### **Efektivitas**

Efektivitas didefinisikan sebagai seberapa baik pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, serta sejauh manakah seseorang dapat menghasilkan *output* sesuai dengan yang diharapkan (Masruri, 2014). Indikator pengukuran efektivitas menurut Makmur dalam Mingkid (2017) yaitu sebagai berikut : (1) Ketepatan waktu; (2) Ketepatan perhitungan biaya; (3) Ketepatan pengukuran; (4) Ketepatan penentuan tujuan; dan (5) Ketepatan sasaran.

### **Efisiensi**

Efisiensi didefinisikan sebagai ukuran yang mencerminkan perbedaan dari *output* maksimum yang dapat dicapai untuk tingkat *input* tertentu (Wahab dan Haron, 2017). Indikator pengukuran efisiensi menurut Bappenas dalam Raeni (2014) yaitu : (1) Standar dan indikator kinerja; (2) Survei kepuasan *stakeholder*; (3) Peraturan organisasi dan tata laksana pemerintahan yang efisien; dan (4) Program kerja yang tidak tumpang tindih.

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi yang terdapat di lingkungan bermasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan serta alternatif dalam

menangani masalah, dan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan nilai atau evaluasi mengenai hasil akhir atas perubahan yang terjadi (Markidanto dalam Mustanir, 2017). Indikator pengukuran partisipasi masyarakat berdasarkan Mustanir (2017) yaitu : (1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; (2) Partisipasi dalam pelaksanaan; (3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat; dan (4) Partisipasi dalam evaluasi.

**Good Governance**

*Good governance* didefinisikan sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi (Halim, 2016). Indikator pengukuran *good governance* berdasarkan UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam Mardiasmo (2021) yaitu : (1) Partisipasi; (2) Kepastian hukum; (3) Transparansi; (4) *Responsiveness*; (5) Efektivitas dan efisiensi; serta (6) Akuntabilitas.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Hasil Penelitian**

**1. Uji Validitas**

Berdasarkan hasil uji validitas masing-masing item pernyataan pada tiap variabel diperoleh nilai r-hitung lebih besar daripada nilai r-tabel (0,2480), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh indikator pernyataan dinyatakan valid dan layak untuk digunakan.

**2. Uji Reliabilitas**

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS, nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dinyatakan lolos uji reliabilitas atau reliabel.

**3. Uji Asumsi Klasik**

a. Uji Normalitas

**Tabel 4.5**

**Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		<b>Unstandardized Residual</b>
N		63
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,57585418
Most Extreme Differences	Absolute	0,107
	Positive	0,107
	Negative	-0,104
Test Statistic		0,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,071 <sup>c</sup>

---

Sumber: Hasil olah data SPSS 22.0

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* yang telah dilakukan menghasilkan nilai *Asymp. Sig (2-Tailed)* dengan nilai 0,071, di mana  $0,071 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan layak dan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

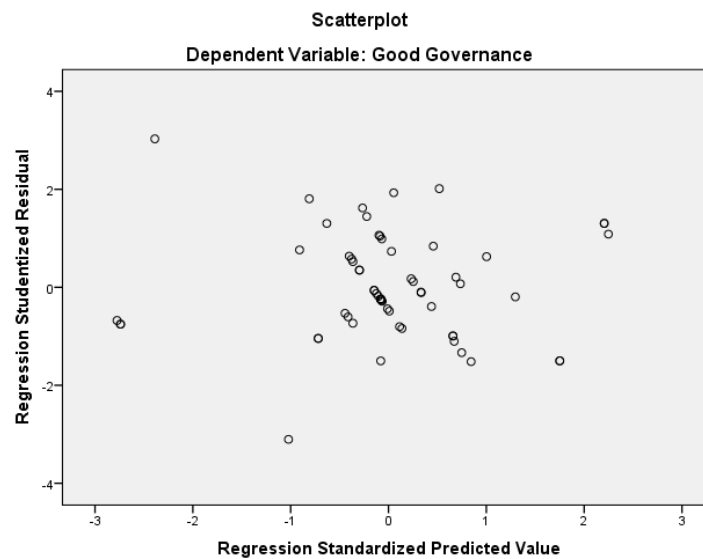
**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Transparansi	0,797	1,255
Akuntabilitas	0,424	2,359
Efektivitas	0,198	5,044
Efisiensi	0,229	4,369
Partisipasi Masyarakat	0,391	2,557

Sumber: Hasil olah data SPSS 22.0

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji multikolinearitas tersebut tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Hasil olah data SPSS 22.0

Gambar 4.1 menunjukkan gambar yang diperoleh dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *Scatterplot*. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik atau lingkaran-lingkaran kecil menyebar secara acak (tidak beraturan) dan tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada model regresi dalam penelitian ini dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

**4. Uji Hipotesis**

a. Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.7**

**Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	4,208	1,326	
Transparansi	-0,073	0,043	-0,086
Akuntabilitas	0,106	0,066	0,111
Efektivitas	-0,082	0,102	-0,081
Efisiensi	0,611	0,077	0,743

Partisipasi Masyarakat	0,271	0,066	0,293
------------------------	-------	-------	-------

Sumber: Hasil olah data SPSS 22.0

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresi linear sebagai berikut :

$$Y = 4,208 - 0,073 X_1 + 0,106 X_2 - 0,082 X_3 + 0,611 X_4 + 0,271 X_5 + e$$

b. Uji F

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji F (Kelayakan Model)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	285,746	5	57,149	88,382	0,000 <sup>b</sup>
Residual	36,857	57	0,647		
Total	322,603	62			

Sumber: Hasil olah data SPSS 22.0

Berdasarkan tabel ANOVA atau F diperoleh nilai F-hitung sebesar 88,382 dimana nilai F-hitung tersebut lebih besar dari F-tabel yang bernilai 2,534 dan nilai Sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi *good governance*, atau **transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap *good governance*.**

c. Uji t

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji t**

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.	Hasil
Transparansi	-1,708	2,00247	0,093	Tidak berpengaruh
Akuntabilitas	1,613	2,00247	0,112	Tidak berpengaruh
Efektifitas	-0,807	2,00247	0,423	Tidak berpengaruh
Efisiensi	7,935	2,00247	0,000	Berpengaruh



Partisipasi Masyarakat	4,093	2,00247	0,000	Berpengaruh
------------------------	-------	---------	-------	-------------

Sumber: Hasil olah data SPSS 22.0

Berdasarkan tabel output uji t menggunakan program SPSS di atas, dapat diinterpretasikan bahwa variabel transparansi (X1), akuntabilitas(X2), dan efektivitas (X3) tidak berpengaruh atau kurang berperan penting terhadap *good governance* di Desa Gumpang karena nilai t-hitung < t-tabel dan nilai Sig. lebih besar dari 0,05. Sedangkan variabel efisiensi (X4) dan partisipasi masyarakat (X5) berpengaruh atau berperan penting terhadap *good governance* di Desa Gumpang, hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung > t-tabel dan nilai Sig. kurang dari 0,05.

- d. Koefisien Determinasi *Adjusted R Square* (R<sup>2</sup>)

**Tabel 4.10**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi *Adjusted R Square***

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	0,847 <sub>a</sub>	0,717	0,692	0,07070

Sumber: Hasil olah data SPSS 22.0

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,692 atau sebesar 69,2%. Hal tersebut diartikan bahwa variasi *good governance* dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat sebesar 69,2%. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 30,8% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar variabel dalam penelitian ini.

**3.2. Pembahasan**

**1. Peran Transparansi Pada Akuntansi Sektor Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Gumpang**

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transparansi pada akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap *good governance* di Desa Gumpang (masih kurang diterapkan dengan maksimal oleh pemerintah desa). Hal ini dibuktikan dengan nilai Sig. yang diperoleh yaitu 0,093 > 0,05. Dalam pelaksanaan transparansi, pemerintah desa mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENGBANGDES) dan menyediakan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan keuangan dan non-keuangan yang ditempelkan pada papan pengumuman desa atau di papan-papan kecil yang ada di sekitar desa.

Hasil penelitian ini belum sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa transparansi secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa dalam pencapaian *good governance*. Kendati demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pawindu *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.

### **2. Peran Akuntabilitas Pada Akuntansi Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Gumpang**

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas pada akuntansi sektor publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *good governance* atau dalam artian lain peran akuntabilitas kurang diterapkan dengan baik oleh pemerintah Desa Gumpang. Hal ini dibuktikan nilai Sig. yang diperoleh yaitu 0,112 di mana nilai tersebut besar dari 0,05. Dalam pelaksanaan akuntabilitas, pemerintah desa memasang spanduk pengumuman yang berisi mengenai laporan keuangan desa untuk satu periode pemerintahan yang dipasang di balai desa atau kelurahan.

Hasil penelitian ini belum mendukung penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap pembangunan desa dalam pencapaian *good governance*. Kendati demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Priskila (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.

### **3. Peran Efektivitas Pada Akuntansi Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Gumpang**

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas pada akuntansi sektor publik tidak berpengaruh atau kurang berperan dengan baik dalam mewujudkan *good governance* di Desa Gumpang, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi dalam penerapannya. Hal ini dibuktikan dengan nilai Sig. yang diperoleh yaitu 0,423 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dalam pelaksanaan efektivitas guna mewujudkan *good governance*, pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan selalu mengupayakan untuk melaksanakan penetapan tujuan yang ingin diraih bersama-sama dengan masyarakat secara tepat sesuai dengan yang telah direncanakan pada saat MUSRENBANGDES sehingga dapat menunjang efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

Hasil penelitian ini belum konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap pencapaian *good governance*. Kendati demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pawindu (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.

### **4. Peran Efisiensi Pada Akuntansi Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Gumpang**

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa efisiensi pada akuntansi sektor publik

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *good governance* atau dalam artian lain efisiensi memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan *good governance* di Desa Gumpang. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang diperoleh variabel efisiensi yaitu sebesar 0,611 dengan nilai Sig. yaitu  $0,000 < 0,05$ . Pelaksanaan prinsip efisiensi pada akuntansi sektor publik guna mewujudkan *good governance* dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengelola dana desa sesuai dengan alokasinya yang dapat diketahui oleh masyarakat dengan melihat laporan realisasi penggunaan dana desa pada akhir periode.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Siregar *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa efisiensi secara signifikan berpengaruh terhadap pencapaian *good governance*. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pawindu *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.

### **5. Peran Partisipasi Masyarakat Pada Akuntansi Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Gumpang**

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada akuntansi sektor publik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *good governance* atau dalam artian lain partisipasi masyarakat memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan *good governance* di Desa Gumpang. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang diperoleh variabel partisipasi masyarakat yaitu sebesar 0,271 dengan nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ . partisipasi masyarakat. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, pemerintah Desa Gumpang turut mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan mengenai pengelolaan dana desa dalam program pembangunan desa. Masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan dengan mengikuti musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat secara signifikan berpengaruh terhadap pembangunan desa dalam mewujudkan *good governance*. Kendati demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis peran akuntansi sektor publik dalam mewujudkan *good governance* di Desa Gumpang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Transparansi (X1) pada akuntansi sektor publik tidak berperan penting dalam mewujudkan *good governance* (Y) di Desa Gumpang. Prinsip transparansi sudah diterapkan oleh pemerintah desa dengan menyediakan

akses informasi melalui balai desa, akan tetapi masih kurang maksimal karena akses informasi melalui *web* belum dioperasikan lagi sehingga memunculkan beberapa responden yang masih sulit mendapat akses dan merasa kurang setuju bahwa prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik.

2. Akuntabilitas (X2) pada akuntansi sektor publik tidak berperan penting dalam mewujudkan *good governance* (Y) di Desa Gumpang. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas oleh pemerintah desa masih kurang optimal, hal ini didukung dengan beberapa responden yang menjawab kurang setuju pada beberapa item pernyataan mengenai akuntabilitas.
3. Variabel efektivitas (X3) pada akuntansi sektor publik tidak berperan penting dalam mewujudkan *good governance* (Y) di Desa Gumpang. Penerapan prinsip efektivitas masih belum dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah desa, hal ini didukung dengan adanya responden yang menjawab kurang setuju pada item pernyataan mengenai efektivitas.
4. Efisiensi (X4) pada akuntansi sektor publik memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan *good governance* (Y) di Desa Gumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip efisiensi dengan cukup baik sesuai dengan peraturan organisasi dan didukung pula oleh responden yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju pada item pernyataan mengenai efisiensi.
5. Partisipasi masyarakat (X5) pada akuntansi sektor publik berperan penting dalam mewujudkan *good governance* (Y) di Desa Gumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dengan cukup baik yaitu dengan diselenggarakannya MUSRENBANGDES dan didukung pula oleh responden yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju pada item pernyataan mengenai partisipasi masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini dan bagi para peneliti selanjutnya yaitu :

1. Pemerintah Desa Gumpang diharapkan untuk dapat mempertahankan prinsip-prinsip pada pelaksanaan akuntansi sektor publik yaitu efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan *good governance* di Desa Gumpang. Selain itu, peneliti juga berharap agar pemerintah desa dapat menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dengan lebih baik lagi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas sampel (masyarakat umum di Desa Gumpang) dan variabel lain seperti responsibilitas, responsivitas, atau visi strategis sehingga pembahasan dalam penelitian mengenai *good governance* menjadi semakin luas. Serta diharapkan pula untuk dapat melakukan penelitian menggunakan teknik wawancara secara langsung dan/atau survei lapangan untuk memperkuat data yang telah diperoleh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, R., Mudjib, A. W., Lestariana, F. F., & Handiwibowo, G. A. (2019). The Implications Of Good Governance Of Village Government Office In Sidoarjo. *Binus Business Review*, 10(3), 147-158.

- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-7.
- Christianti, N. W. C., & Maharani, A. (2022). Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso). *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(2), 103-116.
- Defitri, S. Y. (2022). *Karakteristik Akuntansi Sektor Publik*. Akuntansi Sektor Publik, 9.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27.
- Harahap, H.F., & Harahap, J.P.R. (2022). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, 3(2), 371-376.
- Haryadi, R. N., & Handayani, N. (2021). Analisis Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1).
- Hayuningtyas, E. D. A., & Rahmayati, A. (2020). *Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen)*. (Doctoral Dissertation, IAIN SURAKARTA).
- Kristiyanti, L. M. S. (2021). The implementation of good corporate governance, village apparatus performance, organizational culture, and its effects against village fund management accountability (Case study of Tulung District, Klaten Regency). *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1985-1996.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Mutia, A. (2022). ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021. Diakses pada tanggal 5 April 2023 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>
- Pawindu, T. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Di Kecamatan Walenrang (Studi Pada Desa Baramamase, Desa Lalong, dan Desa Batusitanduk). (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo).
-

## PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306

Website: <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas>

---

- Pratiwi, D. N. (2020). An Analysis Of Village Official's Perception Of The Village Financial System (Siskeudes). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(1), 165-175.
- Priskila. (2020). Analisis Penerapan Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Salumakki, Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju). *Skripsi*. Makassar: Universitas Kristen Indonesia Paulus.
- Raeni. (2014). “Pengaruh Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Produktivitas SMK (Kajian Persepsi Guru SMK Se-Kabupaten Kendal)”. *Skripsi*. Semarang: Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Sahir, M. (2022). Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik Dalam Mencapai Good Governance Pada Pemerintah Daerah Kota Makassar. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Samad, Z., Mustanir, A., & Pratama, M. Y. P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten Enrekang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 379-395.
- Siregar, H. O., & Muslihah, S. (2019). Implementation Of Good Governance Principles In Village Government Context In Bantul Regency, Yogyakarta: Good Governance. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(4), 503-514.
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131-142.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (p. 394). Bandung : Alfabeta.